



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDULLAH
2. Jabatan : PANITERA MUDA HUKUM
3. NHK : 417527

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.273.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/260 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.250.000.000
2. Tanah Seluas 1.003 m² di KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.003.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m²/84 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m²/120 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 17.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO 2BJ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 71.000.000****D. SURAT BERTHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 38.557.608****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	4.400.057.608
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.400.057.608

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.